

Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu

Analysis Of Local Tax Management And Regional Retribution On Increasing Regional Original Income (Pad) Belu Regency

Margareta D. Pangastuti¹, Frederick Wiston Nalle²
 pangastustidiana7@gmail.com¹, fredericnalle@gamil.com²
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Timor, Indonesia

Abstract

Each autonomous region is required to be independent, especially in extracting and managing regional finances, especially user fees. The Belu Regency Regional Tax Management has the biggest role and contribution to regional original income, where the management is left to the region itself and in carrying out regional development, the source of regional tax revenue factors greatly determines the implementation of the development itself. In addition to local taxes, regional levies are also the most likely source of income to be developed in accordance with the creativity of local governments, because they gain the freedom to collect levies. The purpose of this study is to determine whether there is an effect of Regional Taxes and Regional Retributions on the increase in Regional Original Income (PAD) of Belu Regency. The analytical tool used is simple and multiple regression. The data used is secondary data. Partial research results show that there is a significant effect between the Regional Tax (X1) variable on the Regional Original Income (Y) variable. There is no effect between Regional Levies (X2) on Regional Original Income (Y) and Simultaneously there is no influence between Regional Taxes (X1) and Regional Levies (X2) on Regional Original Income (Y).

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income.

Abstrak

Setiap daerah otonom dituntut untuk dapat memiliki kemandirian terutama dalam penggalan dan pengelolaan keuangan daerah khususnya retribusi. Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Belu mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan asli daerah, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreativitas pemerintah daerah, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu. Alat analisis yang digunakan dengan regresi sederhana dan berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil Penelitian secara Parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Daerah (X₁) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y). Tidak terdapat pengaruh antara Retribusi Daerah (X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) dan secara Simultan tidak terdapat pengaruh antara Pajak Daerah (X₁) dan Retribusi Daerah (X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Pendahuluan

Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pelimpahan tugas dari pemerintah pusat. Desentralisasi atau otonomi Daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Belu mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap Pendapatan asli daerah, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri. Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang sering disamakan tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subyek pajak dan obyek pajak. Subyek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah di Kabupaten Belu akan terlaksana dengan optimal apabila pelaksanaan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang besarnya sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai data yang diperoleh bahwa Pajak daerah Kabupaten Belu dari tahun 2008 sampai 2018 terjadinya fluktuasi. Kondisi ini dapat diperbaiki jika pemerintah dalam hal ini Kabupaten Belu lebih serius dalam memanfaatkan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kabupaten Belu memiliki potensi dari berbagai sektor dan untuk menunjang optimalisasi potensi daerah yang ada dan peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Belu 2008 sampai 2018 yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten juga mengalami fluktuasi. Maka Pemerintah Daerah terus meningkatkan pengelolaan retribusi daerah. Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tentu tidak terlepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. serta dapat membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat dalam berbagi bidang anatar lain sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Sejalan dengan konsep di atas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu mempunyai target dan realisasi yang dapat dilihat dalam penyajian data oleh BPKAD selama sebelas tahun.

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Kab. Belu, Tahun 2008-2018

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	22,258,927,170.00	22,258,927,170.00	96,84%
2009	25,830,284,390.00	22,095,998,629.29	85,54%
2010	39,661,984,105.00	33,447,006,092,00	84%
2011	52,405,948,932.00	34,802,681,366.00	66,40%
2012	59,444,912,510.00	47,085,513,257.18	79%
2013	63,823,292,216.00	63,821,358,066.00	98,53%
2014	63,892,438,331.00	70,227,478,518.70	109,92 %
2015	64,534,729,633.00	72,408,429,831.90	112,20%

2016	64,906,714,769.00	74,823,080,564.95	115.28%
2017	96,267,919,082.00	101,246,072,215.34	105.17%
2018	82,620,352,036.00	88,592,824,574.83	107.23%

Sumber: BPKAD Kab.Belu,2019

Data tersebut dapat diketahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belu mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2018. Pada tahun 2017 realisasi naik sampai dengan 105,17% karena terbayarnya tunggakan terhadap pajak daerah yang belum dibayar pada tahun sebelumnya dan naiknya pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang lain yang sah. Namun demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial maupun simultan variable pajak dan retribusi daerah terhadap tingkat pendapatan asli daerah di Kabupaten Belu.

Metode

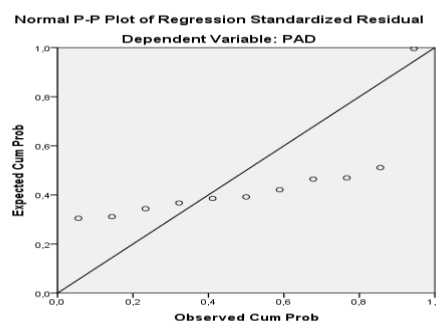
Penelitian ini dilakukan di kabupaten Belu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2008-2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua variabel bebas (independent variable) yaitu Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) dan satu variabel terikat (dependent variable) yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Alat analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi berganda.

Pembahasan

Sebelum data dianalisis maka tahap awal yang perlu dilakukan adalah melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memenuhi kaidah statistik yang diisyaratkan.

Uji Normalitas

Dengan penyebaran data pada dalam gambar diagram *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai residual yang terdistribusi secara normal.



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas

Uji Multikolonieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Metode Uji Multikolonieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation Faktor* (VIF) pada model regresi, jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terdapat gejala

Multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai tolerance $< 0,1$ dan nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 2 Hasil Uji Multikoloniaritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Pajak Daerah	0,999	1,001	Tidak ada multikolinearitas
Retribusi daerah	0,999	1,001	Tidak ada multikolinearitas

Sumber :Hasil olahan data SPSS 21

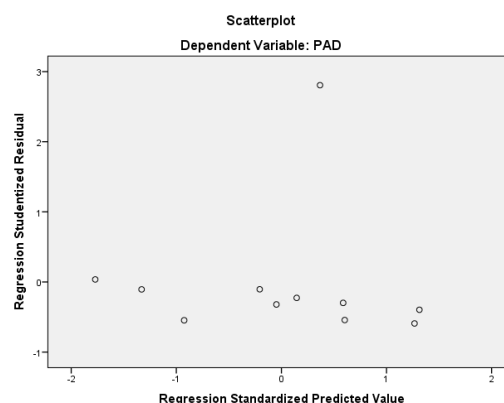
Berdasarkan tabel *Output Coefficient* diatas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* varaibel Pajak Daerah sebesar $0,999 > 0,1$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar $1,001 < 10$, nilai *Tolerance* variabel Retribusi Daerah sebesar $0,999 > 0,1$ dan nilai VIF sebesar $1,001$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam variabel tersebut.

Uji Autokorelasi

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar $1,307$ sedangkan nilai DU dan DL yang diperoleh dari tabel *Durbin Watson* dengan n (sampel) = 11 dan k (variabel bebas = 2) didapat nilai DL = $0,933$ dan DU = $1,969$ Jadi nilai DL sebesar $0,933$ dan besaran nilai $4 - DL$ atau $4 - 0,933 = 3,067$. Dengan demikian dapat disimpulkan data di atas tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastitas

Jika penyebarannya titik-titik tersebut tidak membentuk pola yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah Heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, jika penyebaran titik-titik terdapat pola yang jelas di atas atau di bawah angka nol (0) pada sumbu Y maka terdapat masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2013)



Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil analisis dengan bantuan program *SPPS 21 for windows* dapat dilihat bahwa penyebaran titik-titik residual tidak teratur (tidak membentuk suatu pola tertentu) maka kesimpulan yang bisa diambil bahwa tidak terjadi gejala Homokedastisitas (gejala varians residual yang sama antar pengamatan) sehingga asumsi ini dapat terpenuhi.

Uji Regresi

Tabel 3 Hasil Uji Variabel Pajak Daerah (X₁) terhadap PAD (Y)

Model	Konstanta	Beta	T	R	R ²	Sig
B	45,864	1,225	0,583	0,786	0,665	0,003

Sumber : Hasil Olahan SPSS 21.0

Besarnya nilai regresi antara variabel Pajak Daerah (X₁) terhadap variabel PAD (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i$$

$$Y = 45,864 + 1,225 + \epsilon_i$$

Nilai $\beta_0 = 45,864$ ini menjelaskan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel Pajak Daerah (X₁) maka variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 45,864. Tetapi jika ada perubahan pada variabel pajak daerah 1 satuan maka PAD akan bertambah sebesar 1,225.

Besarnya nilai koefisien regresi (R) variabel Retribusi Daerah (X₁) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) 0,786 yang artinya bahwa antara variabel Pajak Daerah dan variabel PAD memiliki hubungan yang terkategori **kuat**.

Koefisien determinasi (R²) menjelaskan tentang variasi nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) ditentukan oleh variabel Pajak Daerah (X₁) yang dilihat dari hasil analisis koefisien determinan (R²) diperoleh sebesar 0,665 artinya bahwa besarnya variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Pajak Daerah (X₁) sebesar 66,5% dan sisanya 33,5% dipengaruhi oleh variabel X yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan dk = n - k (11 - 22=9) memperoleh t_{tabel} sebesar 1,833 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,569 dengan demikian nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} dimana 0,583 > 1,833 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Daerah (X₁) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan tingkat signifikansi 0,003 < 0,05.

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Sederhana Retribusi daerah (X₂) terhadap PAD (Y)

Model	Konstanta	Beta	t	R	R ²	Sig
B	38,868	0,079	0,158	0,018	0,010	0,071

Sumber : Hasil Olahan SPSS 21.0

Besarnya nilai regresi antara variabel Retribusi Daerah (X₂) terhadap variabel PAD (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$$

$$Y = 38,868 + 0,079 X_2 + \epsilon_i$$

Nilai $\beta_0 = 38,868$ ini menjelaskan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel Retribusi Daerah (X₂) maka variabel Pendapatan Asli Daerah 38,868. Tetapi jika ada

perubahan pada variabel Retribusi Daerah 1 satuan maka PAD akan bertambah sebesar 0,079.

Besarnya nilai koefisien regresi (R) variabel Retribusi Daerah (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) 0,018 yang artinya bahwa antara variabel Retribusi Daerah dan variabel PAD mempunyai hubungan yang terkategori **Sangat Rendah**.

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan tentang variasi nilai Pendapatan Asli Daerah (Y) ditentukan oleh variabel Retribusi Daerah (X_2) yang di lihat dari hasil analisis koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,010 artinya bahwa besarnya variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dipengaruhi oleh variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,10% dan sisanya 90% dipengaruhi oleh variabel X yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k$ ($11 - 22 = 9$) memperoleh t_{tabel} sebesar 1,833 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,958 dengan demikian nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} dimana $0,158 < 1,833$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel Retribusi Daerah (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,078 > 0,05$.

Tabel 5 Hasil Uji Regresi X_1, X_2 terhadap variabel PAD (Y)

Model	Konstanta	X1	X2	F	R2	Sig
B	45,185	1,222	0,050	0,144	0,35	0,097

Sumber : Hasil Olahan SPSS 21.0

Adapun persamaan hubungan antara variabel Pajak Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Retribusi Daerah (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebagai berikut:

$$Y = 45,185 + 1,222 + 0,050 + \epsilon_i$$

- Nilai $\beta_0 = 45,185$ artinya jika tidak ada perubahan pada variabel Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) maka Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 45,185
- Nilai $\beta_1 = 1,222$ artinya jika ada perubahan pada variabel Pajak Daerah (X_1) sebesar satu-satuan maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat sebesar 1,222
- Nilai $\beta_2 = 0,050$ artinya jika ada perubahan pada variabel Retribusi Daerah (X_2) sebesar satu-satuan maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,050

Besarnya nilai koefisien regresi (R) variabel Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,187 ini artinya hubungan antar variabel Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) **Sangat Lemah**.

Hasil Uji F

F tabel dapat dilihat pada tabel statistik bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel - 1) dan df 3 ($n - k - 1$) atau $11 - 2 - 1 = 8$ (n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel independent) hasil diperoleh untuk F_{tabel} sebesar 4,26. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($0,144 < 4,26$) maka hipotesis tidak di terima "Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Berdasarkan tingkat signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis di terima dan jika signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis di tolak. Karena signifikansi pada Uji F lebih dari 0,05 ($0,097 > 0,05$) maka

hipotesis di tolak artinya bahwa “Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)”.

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dalam uji regresi berganda adalah sebesar 0,35. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 35% sedangkan sisanya sebesar 65% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Simpulan

Berdasarkan Analisis yang dilakukan bahwa Pajak Daerah (X_1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) d memperoleh t_{tabel} sebesar 1,833 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,569 dengan demikian nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} dimana $0,583 > 1,833$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pajak Daerah (X_1) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$. Sedangkan hasil penelitian untuk Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k$ ($11 - 2 = 9$) memperoleh t_{tabel} sebesar 1,833 dan t_{hitung} yang diperoleh sebesar 0,958 dengan demikian nilai t_{hitung} lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} dimana $1,833 > 0,958$ maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh antara variabel Retribusi Daerah (X_2) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan tingkat signifikansi $0,078 > 0,05$. Hasil penelitian secara simultan dapat menunjukkan bahwa F tabel dapat dilihat pada tabel statistik bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel -1) dan df 3 ($n - k - 1$) atau $11 - 2 - 1 = 8$ (n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel independent) hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 4,26. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($0,144 < 4,26$) maka hipotesis tidak di terima “Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Berdasarkan tingkat signifikansi, jika signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis di terima dan jika signifikan $> 0,05$ maka hipotesis di tolak. Karena signifikansi pada Uji F lebih dari 0,05 ($0,097 > 0,05$) maka hipotesis di tolak artinya bahwa “Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)”.

Daftar Pustaka

- Priyatno, Duwi, 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS, Yogyakarta Mediakom.
- Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung: Fokusmedia. 2006.
- Undang-undang No.1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 tahun 1997 tentang Peraturan Pokok Terhadap Aturan Barang Inventaris Pemerintah Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah.